

**PERFORMANSI KELOMPOK TANI HUTAN (KTH) DALAM PENGELOLAAN
HUTAN KEMASYARAKATAN: DIMENSI KELOLA KELEMBAGAAN,
KAWASAN, DAN USAHA**

***THE PERFORMANCE OF FOREST FARMER GROUPS (KTH) IN COMMUNITY
FOREST MANAGEMENT: DIMENSIONS OF INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS,
FOREST AREA MANAGEMENT, AND ENTERPRISES***

Oleh:

Hefri Oktoyoki^{1*)}, Benny Pratama²⁾, Safnizar³⁾, Rika Himawan⁴⁾

¹⁾Program Studi Kehutanan Universitas Bengkulu, Kota Bengkulu, Indonesia (38122)

²⁾Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, Jakarta, Indonesia (10110)

³⁾Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, Kota Bengkulu, Indonesia (38225)

⁴⁾KPHL Bukit Daun Provinsi Bengkulu, Kota Bengkulu, Indonesia (38223)

*Email: hefri.oktoyoki@unib.ac.id

Diterima: 14 Oktober 2023

Disetujui: 23 Oktober 2023

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji inti dari Perhutanan Sosial termasuk hutan kemasyarakatan terdiri dari tiga aspek: kelola kelembagaan, kelola kawasan, dan kelola usaha. Metode yang digunakan melalui pendekatan eksploratif dengan data yang diambil menggunakan metode survei dan pengamatan lapangan. Dimensi kelola kawasan, kelembagaan, dan usaha diukur dengan menggunakan indikator ukuran dari Peraturan Kepala Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumberdaya Manusia No P.5/P2SDM/Set/Kum.1/7/2020. Hasil penilaian performa kelembagaan KTH Tunas Maju pada dimensi kelola kelembagaan nilainya sebesar 205 atau 56.94% dari maksimal nilai indikator sebesar 360. Penilaian performa kelola kawasan mencapai skor 120, yang setara dengan 60% dari nilai indikator maksimal sebesar 200. Performa kelola usaha skornya 215, atau 48,86% dari nilai indikator maksimal sebesar 440. Kesimpulannya performansi KTH Tunas Maju berada pada posisi "KTH Kelas Madya" dengan skor total 540. Dengan melihat potensi yang ada, maka untuk meningkatkan performannya masih sangat potensial. Indikator yang perlu ditingkatkan seperti: partisipasi kaum wanita dalam kepemimpinan dan sebagai anggota kelompok, penambahan Rencana Kegiatan Kelompok, frekuensi pertemuan kelompok, tingkat kehadiran anggota, kelengkapan sekretariat dan administrasi, partisipasi pengurus dan anggota dalam kegiatan peningkatan kapasitas dan pelatihan, perlu adanya Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat, perluasan mitra usaha, pengembangan jenis usaha atau diversifikasi produk, dan peningkatan modal usaha.

Kata kunci: *Kelompok tani hutan, Performansi, Perhutanan sosial.*

Abstract

This research examines the essence of Social Forestry, including community forestry, which consists of three aspects: institutional, area, and business management. The method is an exploratory approach with data taken using survey methods and field observations. The dimensions of institutional arrangements, forest area management, and enterprises are measured using indicators from the Head of Extension and Human Resources Development Agency Regulation No. P.5/P2SDM/Set/Kum.1/7/2020. The assessment results for KTH Tunas Maju's institutional performance in the area management dimension showed a score of 205 or 56.94% of the maximum indicator value of 360. The assessment for area management performance reached a score of 120, equivalent to 60% of the maximum indicator value of 200. The business management performance score was 215, or 48.86% of the maximum indicator value 440. Consequently, KTH Tunas Maju's overall score is 540, placing it in the "Intermediate-level KTH" category. Considering the existing potential, there is still substantial space for improvement in its performance. Indicators that require enhancement include increased participation of women in leadership positions and membership within the group, the addition of group activity plans, frequency of group meetings, member attendance rates, completeness of secretarial and administrative functions, involvement of managers and members in capacity-building activities and training, and the necessity for a Community Forestry Extension Officer. Furthermore, expanding business partnerships, diversifying products, and increasing business capital is essential.

Keywords: *Forest Farmer Group, Performance, Social forestry*

PENDAHULUAN

Hutan Kemasyarakatan (HKm) merujuk pada hutan negara yang digunakan terutama untuk memberdayakan masyarakat yang tinggal di dalamnya dan di sekitar wilayah hutan tersebut. Upaya pemberdayaan masyarakat ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian mereka sehingga mereka dapat memperoleh manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil. Hal ini dicapai melalui pengembangan kapasitas dan memberikan akses bagi masyarakat guna mencapai kesejahteraan (Charnley and Poe, 2017; Sarintan Efratani Damanik *et al.*, 2022).

Dalam konteks pengelolaan, Hutan Kemasyarakatan mengedepankan peran masyarakat sebagai pelaku utama, yang mencakup berbagai aspek pengelolaan secara komprehensif, termasuk penanaman, pemeliharaan, dan pemanfaatan hutan (Foundjem-Tita *et al.*, 2018). Permenhut No. P 37/Menhut/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan menegaskan bahwa pembangunan Hutan Kemasyarakatan (HKm) memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani hutan lokal dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya hutan secara adil, berkelanjutan, dan menjaga kelestarian fungsi hutan serta lingkungan hidup sebagai prioritas utama dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan penelitian (Oktoyoki *et al.*, 2023), salah satu KTH yang akan dijadikan percontohan atau model pengelolaan hutan kemasyarakatan di Provinsi Bengkulu adalah KTH Tunas Maju, Gapoktanhut HKm Tri Setia Desa Tebat Pulau. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) KTH ini melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Rejang Lebong No. 180.186.III tahun 2015, KPHL unit III Bukit Daun dan KPHL Bukit Balai Rejang. Izin ini mencakup wilayah seluas 527,97 hektar (RPHJP KPHL Bukit Daun, 2017). Namun, belum diketahui kinerja KTH tersebut sejauh ini, sehingga pada dimensi apa upaya-upaya perbaikan perlu diintervensi lebih jauh belum dapat direncanakan dengan tepat.

Penjelasan di atas menuntut untuk dilakukan penilaian performansi KTH Tunas Maju tersebut agar dapat dianalisis posisi kinerjanya pada saat ini. Sesuai dengan yang diungkapkan (Oktoyoki and Suharjito, 2016), kelembagaan menjadi penentu dalam keberhasilan pengelolaan hutan. KTH yang kuat akan melahirkan kelestarian ekologi dan ekonomi bagi petani hutan, dan sebaliknya. Penelitian ini mengambil fokus pada dimensi kelola kawasan, kelembagaan, dan kelola usaha dalam melihat posisi performansi KTH Tunas Maju.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Oktober 2022 – Februari 2023 pada KTH Tunas Maju di Desa Tebat Pulau, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Pemilihan KTH tersebut sebagai lokus penelitian karena akan dijadikan model pengelolaan kelompok tani di Provinsi Bengkulu, sehingga perlu dievaluasi performansinya untuk mendapatkan strategi peningkatan kapasitas KTH yang tepat di masa datang. Penelitian ini bersifat eksploratif dengan data yang diambil menggunakan metode survei dan pengamatan lapangan.

Dimensi kelola kawasan, kelembagaan, dan usaha diukur dengan menggunakan indikator ukuran ekologi, kelembagaan, dan ekonomi dari Peraturan Kepala Badan Penyuluh Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia No P.5/P2SDM/Set/Kum.1/7/2020. Data yang dibutuhkan untuk menilai performansi kelola kelembagaan yaitu apakah KTH tersebut memiliki dasar hukum, kepengurusan, aturan kelompok, Rencana Kegiatan Kelompok (RKK) dan kelengkapan administrasi. Penilaian performa kelola kawasan berkaitan dengan pemahaman anggota terhadap batas kelola dengan kawasan hutan, pemetaan wilayah kelola dan pemanfaatan wilayah kelola. Penilaian kinerja kelola usaha bertujuan untuk mengetahui modal awal, sumber penambahan modal yang didapatkan, dan cakupan

pemasaran hasil usaha KTH. Responden penelitian ini adalah seluruh pengurus dan anggota KTH. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif.

Tabel 1. Rekapitulasi skor aspek kajian performa KTH

No.	Aspek Kajian	Nilai maksimal indikator	Jumlah skor
1.	Kelola Kelembagaan	360	
2.	Kelola Kawasan	220	
3.	Kelola Usaha	440	
Total Nilai		1000	

Sumber: Peraturan Kepala Badan Penyuluh Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia No P.5/P2SDM/Set/Kum.1/7/2020.

Tabel 2 . Interval nilai predikat performa kelas KTH

No.	Predikat performansi kelas KTH	Hasil Penilaian
1	KTH kelas Pemula	< 350
2	KTH kelas Madya	350-700
3	KTH kelas Utama	>700

Sumber: Peraturan Kepala Badan Penyuluh Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia No P.5/P2SDM/Set/Kum.1/7/2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Performansi KTH Tunas Maju pada Dimensi Kelembagaan

Perancangan struktur organisasi harus memastikan adanya lingkungan kerja yang efektif dan terkoordinasi dengan baik, sesuai dengan bagian atau fungsi dari setiap divisi manajemen. (Lin *et al.*, 2021).

2. Aspek dan indikator penilaian Performa Kelola Kelembagaan

No	Aspek dan Indikator Penilaian	Nilai Indikator	Skor
1	Bagaimana landasan hukum yang menjadi dasar pendirian KTH	Surat keputusan kepala desa	20
2	Ke-pengurusan	Ketua, sekretaris, bendahara	15
3	Partisipasi perempuan dalam struktur kepengurusan dan keanggotaan kelompok.	Tidak ada	0
4	Rencana kegiatan kelompok (RKK)	Rencana tahunan	10
5	Tingkat kehadiran anggota saat menghadiri pertemuan KTH.	30 – 50%	10
6	Berapa angka rata-rata kehadiran pengurus atau anggota dalam setiap pelaksanaan kegiatan kelompok	51 – 75%	20
7	Proses pengawasan dan penilaian atas aktivitas kelompok.	Pengurus dan anggota, terdokumentasi	10
8	Fasilitas dan perlengkapan sekretariat KTH (termasuk papan nama KTH, papan informasi, pondok pertemuan, perpustakaan, peta wilayah kelola, struktur organisasi, dan sebagainya).	< 3 unsur	10
9	Peraturan atau regulasi yang dimiliki oleh kelompok	AD/ART	20
10	dokumen administrasi kelompok yang harus dipenuhi: buku tamu, daftar anggota, daftar kehadiran pertemuan, notulensi rapat, buku kas, buku tabungan, buku simpanan pinjam, inventaris barang, dan catatan hasil kegiatan.	< 3 buku	5
11	Berapa sering KTH mengadakan pertemuan?	3 bulan sekali	5
12	pengurus atau anggota yang mengikuti program peningkatan kapasitas (seperti pelatihan, kursus, atau magang) dalam tiga tahun terakhir	1 orang	10

13	Apa saja jenis pelatihan bidang kehutanan yang diambil oleh pengurus atau anggota (baik teknis maupun manajemen) dalam kurun waktu tiga tahun terakhir?	2 – 3 jenis	10
14	Bagaimana partisipasi kelompok tani hutan dalam berbagai program pemerintah seperti gerakan penanaman, kegiatan lomba, dan lain sebagainya?	< 5 kegiatan	15
15	Apa saja bentuk-bentuk kearifan lokal yang diaplikasikan dalam aktivitas KTH, seperti hutan larangan, pelestarian flora/fauna lokal, atau pelestarian mata air, dan lain sebagainya?	Pelestarian mata air	15
16	Berapa banyak kelompok baru yang terbentuk akibat pertumbuhan usaha atau inspirasi dari kelompok yang sudah ada?	.>3 kelompok	15
17	Total jumlah Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) yang telah ada	Belum ada	0
18	Berapa banyak anggota yang memiliki potensi untuk menjadi calon pengurus KTH?	2-3 orang	15
Total skor			205
Nilai maksimal indikator			360

Hasil penilaian performa kelembagaan (Tabel 3) menunjukkan bahwa KTH Tunas Maju pada dimensi kelola kelembagaan nilainya sebesar 205 atau 56.94% dari maksimal nilai indikator sebesar 360. Artinya hanya separuh dari total nilai performa kelola kelembagaan yang dapat dicapai KTH Tunas Maju saat ini. Nilai maksimal dari tiap aspek penilaian adalah pada dasar hukum pendirian kelompok yaitu SK Kepala Desa Tebat Pulau, sehingga perlu dibuatkan akta notaris KTH. Meskipun KTH Tunas Maju belum memiliki dana untuk mengurus badan hukum dan membuat akta notaris, penting untuk dicatat bahwa kekuatan pembuktian dari akta notaris sebagai alat bukti diatur dengan jelas dalam pasal 1886 Kitab Undang-undang Hukum (KUH) Perdata. Kekuatan pembuktian dari akta notaris dianggap sempurna, karena akta otentik memberikan bukti yang kuat di antara para pihak, ahli waris, atau pihak-pihak yang memperoleh hak dari mereka tentang isinya yang tercantum dalam akta tersebut (Sasauw, 2015; Mukrimaa *et al.*, 2016), dan sudah ada AD/ART kelompok.

Tabel 3 juga menunjukkan bahwa kepengurusan sudah ada tapi belum maksimal peran dan fungsinya, pemantauan dan evaluasi masih rendah, sekretariat masih belum memadai, rencana kelompok belum detail, hanya ada rencana tahunan, dan tingkat partisipasi anggota yang berjumlah 30 orang dalam kegiatan KTH masih lemah. Faktor-faktor yang menyebabkan penyebaran informasi di KTH Tunas Maju menjadi lambat adalah karena anggota kelompok sibuk dengan kegiatan bertani hingga sore hari dan kurangnya minat mereka untuk berpartisipasi dalam setiap pertemuan. Kondisi ini menyebabkan informasi yang diperoleh dalam pertemuan-pertemuan tersebut sulit tersebar ke seluruh anggota kelompok. Keterlibatan anggota lainnya dalam pertemuan ini sangat rendah. Kegiatan bertani yang memakan banyak waktu dan rendahnya partisipasi anggota juga berdampak pada frekuensi pertemuan KTH. Sesuai yang diungkapkan Luswaga and Nuppenau, (2020) bahwa partisipasi anggota dalam KTH untuk meningkatkan efisiensi, pembagian pengetahuan dan pengalaman, peningkatan kreativitas dan inovasi, semangat kerja tim, penguatan keputusan bersama, dan peningkatan kepatuhan (Anwarudin and Dayat, 2019; Putri, *et al.*, 2023).

Partisipasi perempuan dalam kepengurusan dan sebagai anggota kelompok masih belum terwujud, padahal aspek gender menjadi hal yang membantu dalam keberhasilan pengelolaan kelembagaan (Trisni Utami *et al.*, 2019; Bhattarai, 2020; Pratama and Rijanta, 2021). Kelengkapan administrasi kelompok masih sangat minim, hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan mereka paling tinggi tamatan SMP, sehingga kemampuan mereka dalam mengelola administrasi masih sangat lemah. Untuk mengatasi hal ini maka perlu ditempatkan orang-orang yang berpendidikan tinggi dalam

pengurusan administrasi kelompok, misalnya anak-anak dari anggota KTH yang berpendidikan tinggi. PKSM juga belum ada yang mendampingi KTH Tunas Maju, ini menjadi titik lemah yang krusial karena peran penyuluh atau pendamping kelompok dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan kelompok (Fitria, Suharjito and Ekawati, 2021; Haryanto, Anwarudin and Yuniarti, 2021; Sarintan Efratani Damanik *et al.*, 2022).

Pengurusan dan anggota KTH Tunas Maju relatif cukup sering mengikuti pelatihan ataupun kegiatan peningkatan kapasitas kelompok. Beberapa pelatihan yang pernah mereka ikuti yaitu dari pelatihan yang diadakan oleh Universitas Bengkulu, Akar Foundation, dan BPD LH. Kedepannya pelatihan harus lebih sering diikuti dalam rangka peningkatan kapasitas KTH untuk memperoleh pengetahuan baru, meningkatkan keterampilan teknis dan juga mengembangkan sikap yang positif (Hermudananto *et al.*, 2019; Poudyal, Maraseni and Cockfield, 2019; Futemma, De Castro and Brondizio, 2020).

Kearifan lokal yang ada di KTH Tunas Maju berupa pelestarian sumber air. Pestaarian ini dikarenakan masyarakatnya tinggal di kaki Hutan Lindung Bukit Daun yang berfungsi sebagai tangkapan air. Air dari Bukit Daun tersebut selain menjadi sumber air minum, juga mereka alirkan ke sawah-sawah di desa. Mereka telah membentuk kelompok baru yaitu Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Register Lima yang bergerak untuk *trading* kopi Robusta.

Kedepan perlu didampingi lebih maksimal untuk kelola kelembagaan pad KTH Tunas Maju. Ini menjadi penting karena keberhasilan seluruh aspek dalam pengelolaan hutan sangat ditentukan oleh kuat atau lemahnya kapasistas kelembagaan kelompok (Falk, Kumar and Srigiri, 2019; Gustafsson and Scurrah, 2019; Azizah, Ichsan and Webliana, 2021).

2. Performansi KTH Tunas Maju pada Dimensi Kelola Kawasan

Performa Kelola Kawasan berisi tentang pemahaman pemanfaatan wilayah kelola, pemetaan dan batas wilayah kelola. Kinerja kelola kawasan KTH Tunas Maju dapat di lihat pada Tabel 4.

Tabel 3. Aspek dan indikator penilaian performa kelola kawasan

No	Aspek dan Indikator Penilaian	Nilai Indikator	Skor
1	Sejauh mana anggota memahami batasan wilayah yang dikelola oleh kelompok?	> 75 % paham	20
2	Proses pengaturan dan pemetaan wilayah yang dikelola oleh kelompok.	Dilakukan oleh pihak lain	10
3	Penilaian dan pemahaman terhadap potensi dan kapasitas wilayah yang dikelola oleh kelompok.	Diidentifikasi, tetapi belum di petakan dan didokumentasikan	10
4	Pengenalan dan pencatatan masalah-masalah yang ada di wilayah yang dikelola oleh kelompok.	Diidentifikasi, tetapi belum di petakan dan didokumentasikan	10
5	Eksplorasi wilayah yang dikelola oleh kelompok sejalan dengan potensinya.	Rencana pemanfaatan masih dalam proses	10
6	Kegiatan kelompok dalam menjalankan upaya rehabilitasi.	2-3 kegiatan	10
7	Kegiatan kelompok dalam menerapkan upaya konservasi sumber daya hutan.	1 Kegiatan	10
8	Akibat dari upaya tersebut terhadap meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian hutan dan lingkungan melalui kelompok/organisasi.	1 kelompok	10
9	Efek yang ditimbulkan terhadap lingkungan seperti peningkatan sumber mata air, pengurangan lahan yang kritis, pelestarian	Pengurangan lahan kritis	20

	keanekaragaman hayati, pengurangan kebakaran hutan, dan lain sebagainya.		
10	sertifikat pengelolaan hutan lestari (PHBML/SVLK dan lain-lain).	belum ada proses	0
11	Produk yang dihasilkan sesuai dengan standar Nasional Indonesia (SNI).	Dalam proses pengajuan	10
Total Skor			120
Nilai maksimal indikator			200

Penilaian performa kawasan (Tabel 4) menunjukkan bahwa kinerja kelola usaha KTH Tunas Maju mencapai skor 120, yang setara dengan 60% dari nilai indikator maksimal sebesar 200. Pemahaman anggota KTH Tunas Maju tentang batas wilayah kelola dengan kawasan hutan sudah mencapai tingkat yang cukup memadai. Mereka sudah memahami batas wilayah kelola, namun belum melakukan penandaan dan pemetaan wilayah keseluruhan kelola tetapi, untuk wilayah persil atau wilayah perseorangan dari masing-masing anggota sudah dilakukan sebagian ketika mereka mendapatkan Fasilitas Dana Bergulir (FDB) dari BPDLH tahun 2018. Maka, ke depan perlu dilakukan pemetaan keseluruhan wilayah kelola. Proses pemetaan dan penandaan wilayah kelola kelompok mestinya berlangsung secara partisipatif, melibatkan seluruh pengurus dan anggota kelompok. Hal ini penting karena setiap anggota harus memiliki area tersendiri untuk mengelola sumber daya alam dan lingkungan, sesuai dengan hak komunitas (Bowditch *et al.*, 2020).

Potensi dan daya dukung wilayah kelola dan kawasan hutan oleh kelompok tani hutan Tunas Maju masih belum diketahui dengan pasti. Meskipun sudah ada usaha untuk mengidentifikasi pemetaan dan wilayah kelola, namun belum ada pencatatan peta secara resmi. Selain itu, pemetaan terhadap wilayah kelola dari setiap anggota KTH Tunas Maju juga hanya dilaksanakan pada sebagian anggota dalam bentuk peta persil/andil garapan, namun untuk pemetaan zonasi dan sebagian andil garapan anggota lainnya belum dilakukan. Saat ini, penandaan wilayah kelola anggota KTH Tunas Maju hanya mengandalkan tanaman Hanjuang (*Cordyline fruticosa*) sebagai patokan atau batas dari masing-masing wilayah kelola. Tujuan dari penandaan ini adalah untuk mempermudah pengelolaan wilayah yang telah disepakati dan mencegah potensi terjadinya konflik sosial antara anggota kelompok.

Hingga saat ini, belum ada rencana tertulis atau gagasan mengenai penggunaan wilayah kelola kelompok yang sesuai dengan potensi yang ada di KTH Tunas Maju. Walaupun begitu, beberapa wilayah kelola telah ditanami dengan tanaman durian (*Durio Zibethinus*) dan sedikit tanaman pala yang buahnya dimanfaatkan oleh anggota kelompok tani hutan Tunas Maju untuk dikonsumsi dan dijual.

Aktivitas rehabilitasi yang dilakukan oleh kelompok tani hutan di KTH Tunas Maju termasuk penanaman Jengkol (*Archidendron pauciflorum*), dan beberapa Pinang (*Areca catechu*) serta pelestarian di sepadan sungai. Selain itu, KTH Tunas Maju juga berusaha melestarikan sumber daya hutan dengan melakukan perlindungan mata air dan memanfaatkan jasa lingkungan, seperti penyediaan air agar kualitas dan ketersediaannya tetap terjaga. Tujuan dari rehabilitasi dan konservasi yang dilakukan oleh KTH Tunas Maju adalah untuk menjaga dan memulihkan ekosistem yang ada.

Hingga saat ini, Sertifikat Pengolahan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML) belum diperoleh oleh kelompok tani hutan atau Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK), dan mereka juga belum mengusahakan komoditas sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). Memperoleh sertifikat untuk pengelolaan hutan dan pengusahaan komoditas sesuai dengan standar SNI sangat penting dalam meningkatkan kinerja kelompok tani hutan. Dengan mendapatkan sertifikasi ini, pengelolaan dan pengusahaan komoditas kelompok akan mendapatkan pengakuan resmi dan meningkatkan kepercayaan dari pihak-pihak terkait, termasuk mitra usaha. Butar, Prihandono and Sayekti (2022) menyatakan bahwa produk yang memiliki sertifikasi nasional SNI juga memiliki peluang besar untuk diekspor ke negara-negara tetangga. Selain itu, memproduksi komoditas sesuai

dengan standar nasional akan meningkatkan daya saing produk kelompok tani hutan di pasaran. Namun, dengan masuknya *off taker* ke Desa Tebat Pulau untuk membeli kopi, perlahan mereka mulai meningkatkan kualitas kopi yang dihasilkan.

3. Performansi KTH Tunas Maju pada Dimensi Kelola Usaha

Kinerja Kelola Usaha meliputi sumber modal jenis usaha, kerja sama, pemasaran dan pendapatan kelompok. Kinerja kelola usaha dinilai dari beberapa aspek dengan skor pada KTH masing-masing Tabel 5.

Tabel 4. Aspek dan indikator penilaian performa kelola usaha

No	Aspek dan Indikator Performa	Nilai Indikator	Skor
1	Kenaikan modal usaha dalam jangka waktu tiga tahun terakhir.	< 25%	20
2	penambahan modal usaha didapatkan dari?	Mitra usaha	30
3	Perluasan jenis usaha atau variasi produk selama tiga tahun terakhir.	1 jenis	15
4	Pertemuan dengan pelaku usaha dalam tiga tahun terakhir untuk kepentingan bisnis.	1 kali	10
5	Membangun kerjasama / kemitraan melalui perjanjian atau MoU dalam tiga tahun terakhir.	2 kemitraan	20
6	Pangsa pemasaran produk dari usaha kelompok.	Nasional	30
7	Kenaikan pendapatan keseluruhan kelompok dalam periode satu tahun terakhir.	1 kali lipat	15
8	Penggunaan informasi dan teknologi dari beragam sumber.	1 sumber	15
9	Jumlah tenaga kerja / daya serap yang bekerja di usaha kelompok.	< 10 orang	15
10	Kenaikan omset atau pendapatan dari kegiatan produksi utama dalam tiga tahun terakhir.	Produksi kopi meningkat	15
11	Kenaikan omset atau pendapatan dari usaha turunan atau produksi tambahan dalam tiga tahun terakhir.	25% modal usaha	30
Total skor			215
Nilai maksimal indikator			440

Berdasarkan data yang terdapat pada Tabel 5, kinerja kelola usaha KTH Tunas Maju mencapai skor 215, yang setara dengan 48,86% dari nilai indikator maksimal sebesar 440. Selama 3 tahun terakhir, telah terjadi penambahan modal usaha satu kali untuk peremajaan kopi sambung tunas (*grafting*) dan pemeliharaan kopi pola agroforestri, menunjukkan adanya upaya dalam perbaikan produksi kopi tua mereka. Sumber penambahan modal teridentifikasi cukup signifikan. Berawal dari mereka membentuk KUPS Register Lima, lalu mendirikan Koperasi Rumpun Register Lima. Dalam membangun kelembagaan bisnis tersebut mereka dibantu oleh Akademisi dari UNIB, petugas lapangan BPDH, dan Penyuluh pendamping, sehingga desain bisnis dan pembukuan keuangan tertata dengan baik yang pada akhirnya memperoleh kepercayaan pemilik modal dari Farmaklik Group dan Bank Syariah Indonesia (BSI) memberikan modal masing-masing sebesar Rp.600.000,- dan Rp. 1.200.000.000,-. Akses modal menjadi penting dimiliki agar dapat membantu mengurangi risiko kegagalan dalam pengelolaan usaha (Sensini, 2020; Saheriyanto and Suhaimi, 2021).

Dalam 3 tahun terakhir KUPS Register Lima yang di dalamnya terdiri dari anggota KTH Tunas Maju telah menjalin kemitraan dengan perjanjian/MoU dengan PT. ALKO International Coffee dan PT. Mayora untuk *trading* kopi *greanbean*. Mereka menyuplai kopi ke PT. Mayora sebanyak 8 ton per minggu. Hal ini berimplikasi kepada peningkatan perekonomian anggota dengan cukup signifikan. PT ALKO juga membantu melatih petani tersebut untuk menjalankan proses bisnis kopi yang prospektif,

dan terdapat Project 200 ha pengembangan agroforestri Arabika pada lahan kelola mereka sebagai variasi bisnis di masa depan. Diversifikasi jenis usaha yang dilakukan KTH Tunas Maju berupa produksi dan penjualan kopi bubuk dengan merek *Register Lima Coffee*, ini cukup membantu meningkatkan perekonomian ibu-ibu wanita tani pada kelompok ini.

Total nilai performansi Kelompok Tani Hutan (KTH) Tunas Maju pada setiap indikator yang berdasarkan Peraturan Kepala Badan Penyuluh Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia No. P.5/P2SDM/SET/KUM.1/7/2020 dapat dilihat pada Gambar 1.

Grafik Performa KTH Tunas Maju



Gambar 1 Grafik Performansi KTH Tunas Maju

Tabel 5. Rekapitulasi skor performansi KTH Tunas Maju

No	Nama KTH	Kriteria Penilaian									Skor
		Performa Kelola Kelembagaan			Performa Kelola Kawasan			Performa Kelola Usaha			
		Nilai Skor	Nilai Mak	Bobot %	Nilai Skor	Nilai Maks	Bobot %	Nilai Skor	Nilai Maks	Bobot %	
1	Tunas Maju	205	360	56,94%	120	200	60%	215	440	48,86%	540

Berdasarkan Tabel 6, terlihat bahwa KTH Tunas Maju memperoleh nilai total skor kinerja sebesar 540 atau 55,27%. Mengacu pada Peraturan Kepala Badan Penyuluh Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia No. P.5/P2SDM/SET/KUM.1/7/2020 yang mengklasifikasikan kelas KTH menjadi Kelas Pemula (<350), Kelas Madya (350-700), dan Kelas Utama (>700), dapat disimpulkan bahwa KTH Tunas Maju berada pada posisi performansi "KTH Kelas Madya", nilai ini lebih tinggi dari nilai performa KTH Sejahtera Bersama, Kabupaten Kepahiang dengan skor 380 (Oktoyoki, *et al*, 2023).

Hasil total skor penilaian performansi ini menunjukkan terdapat kenaikan kelas dari ketika KTH ini didirikan dengan skor awal 290 dan sekarang menjadi 540. Namun, terdapat banyak aspek yang perlu ditingkatkan dalam mencapai performansi maksimal. Perlu diperhatikan bahwa penilaian performa kelola usaha mendapatkan persentase penilaian paling besar dibandingkan dengan performa kelola kelembagaan, dan kelola kawasan mendapatkan nilai yang paling kecil. Hal ini disebabkan penandaan batas kawasan belum dilakukan secara maksimal, sedangkan kelola usaha mendapatkan nilai tertinggi karena masuknya permodalan dan sudah ada unit usaha dalam bentuk KUPS yang telah menjalankan bisnisnya dengan cukup baik. Untuk meningkatkan performa kelola usaha, perlu dilakukan kemitraan usaha yang lebih luas dengan kuantitas pengiriman *greenbean* Robusta yang lebih banyak, berkualitas dan mulai merambah pasar global kopi, *quality control* produk juga perlu ditingkatkan, serta akses modal yang lebih besar untuk mengupayakan *scale up* usaha. Kelola kelembagaan juga menjadi fokus perbaikan, seperti kekompakan kelompok, partisipasi kelompok, dan peningkatan peran dan fungsi pengurus dan anggota.

Jika dilihat secara keseluruhan, baru tercapai performa 55,27%, yang artinya posisi KTH Tunas Maju baru separuh jalan. *Transfer of Knowledge, Technology*, pembukaan akses pasar seluas-luasnya, peningkatan akses modal, dan kapasitas kelembagaan masih menjadi hal yang harus dikerjakan. Kolaborasi multipihak, baik KTH, penyuluh pendamping, instansi terkait, NGO, Akademisi, dan mitra usaha perlu terus dibangun.

KESIMPULAN

1. Performa kelola kelembagaan KTH Tunas Maju memperoleh nilai skor sebesar 205, yang setara dengan 56,94% dari nilai maksimal 360. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu minimnya partisipasi kaum wanita dalam kepengurusan dan sebagai anggota kelompok, hanya terdapat satu rencana kegiatan kelompok, frekuensi pertemuan yang hanya dilakukan masih sedikit, kehadiran anggota yang rendah dalam pelaksanaan kegiatan, keterbatasan kelengkapan sekretariat dan administrasi, kurangnya partisipasi pengurus dan anggota dalam kegiatan peningkatan kapasitas dan pelatihan, tidak ada Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat, serta absennya anggota yang berpotensi menjadi kader pengurus KTH Tunas Maju.
2. Performa Kelola Kawasan KTH Tunas Maju meraih nilai skor 120, yang setara dengan 60% dari nilai maksimal 200. Faktor-faktor yang menyebabkan nilai masih belum tinggi adalah belum adanya pengenalan potensi dan daya dukung wilayah kelola kelompok, belum dilakukannya pemetaan wilayah kelola secara keseluruhan, belum terbentuknya kelompok atau organisasi karena dampak Minimnya perhatian dan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian hutan dan lingkungan, serta belum adanya sertifikasi untuk pengelolaan hutan yang lestari dan komoditas yang diusahakan sesuai dengan standar SNI.
3. Performa Kelola Usaha KTH Tunas Maju meraih nilai skor 215, yang setara dengan 48,86% dari nilai maksimal 440. Perkembangan yang cukup signifikan pada aspek mitra usaha dan penjualan serta omset yang meningkat, ada pengembangan jenis usaha atau diversifikasi produk, namun, kerja sama dengan mitra usaha masih sangat potensial untuk diperluas dan ditingkatkan, begitu juga dengan peningkatan modal usaha. Performansi KTH Tunas Maju berada pada posisi "KTH Kelas Madya" dengan skor total 540. Dengan melihat potensi yang ada, maka untuk meningkatkan performanya masih sangat potensial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada KPHL Bukit Daun dan DLHK Provinsi Bengkulu yang telah memfasilitasi kegiatan lapangan baik wawancara maupun pengamatan lapangan selama penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwarudin, O., Dayat, D. 2019. The Effect of Farmer Participation in Agricultural Extension on Agribusiness Sustainability in Bogor, Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*. Vol 6(3),pp: 0-61.
- Azizah, L., Ichsan, A.C. & Webliana, K. 2021. Analisis Kapasitas Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Waku Lani Desa Lenek Duren Dan Desa Toya Lombok Timur. *Jurnal Sylva Scientiae*. Vol 4(1),pp: 72-84.
- Bhattarai, B. 2020. How do gender relations shape a community's ability to adapt to climate change? Insights from Nepal's community forestry. *Climate and Development*. Vol 12 (10),pp: 876–887.
- Bowditch, E. *et al.* 2020. What is Climate-Smart Forestry? A definition from a multinational collaborative process focused on mountain regions of Europe. *Journal of Ecosystem Services*. Vol 4(6),pp: 101-113.
- Butar, F.B., Prihandono, I. & Sayekti, C.W. 2022. Peningkatan Daya Saing Kopi Kare di Dusun Seweru dengan Ekolabel Swadepklarasi. *Jurnal Abdimas*. Vol 26(2),pp: 182–190.
- Charnley, S., & Poe, M.R. 2017. Community forestry in theory and practice: Where are we now?. *Annual Review of Anthropology*. Vol 3(6),pp: 301–336.
- Falk, T., Kumar, S. & Srigiri, S. 2019. Experimental games for developing institutional capacity to manage common water infrastructure in India. *Journal of Agricultural Water Management*. Vol 2(1),pp: 260–269.
- Fitria, W., Suharjito, D. & Ekawati, S. 2021). Peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (Kph) Dalam Implementasi Perhutanan Sosial (Studi di KPH Produksi Kerinci, Provinsi Jambi dan KPH Lindung Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. Vol 18(2),pp: 145–160.
- Foundjem-Tita, D. *et al.* 2018. Viability of community forests as social enterprises: A Cameroon case study. *Ecology and Society*. Vol 23(4),pp: 122-132.
- Futemma, C., De Castro, F. & Brondizio, E.S. 2020. Farmers and Social Innovations in Rural Development: Collaborative Arrangements in Eastern Brazilian Amazon. *Land Use Policy*. Vol 9(9),pp: 104-999.
- Gustafsson, M.T., & Scurrah, M. 2019. Strengthening subnational institutions for sustainable development in resource-rich states: Decentralized land-use planning in Peru. *World Development*. Vol 11(9),pp: 133–144.
- Haryanto, Y., Anwarudin, O., & Yuniarti, W. 2021. Progressive Farmers As Catalysts for Regeneration in Rural Areas Through Farmer To Farmer Extension Approach. *Plant Archives*. Vol 21(1),pp: 867–874.
- Hermudananto, H. *et al.* 2019. Adoption of Agroforestry-Porang Model for Land Utilization under Teak Stands. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement)*. Vol 5(3),pp: 416.
- Lin, T. *et al.* 2021. Farmer social networks: The role of advice ties and organizational leadership in

- agroforestry adoption. *PLoS ONE*. Vol 16(8),pp: 1–18.
- Luswaga, H. & Nuppenau, E.A. 2020. Participatory forest management in west usambara Tanzania: What is the community perception on success?'. *Journal of Sustainability (Switzerland)*. Vol 12 (3),pp: 76-87.
- Mekar, S., Tanjung, Z., & Irfan, Z. 2023. Analisis Partisipasi Anggota Kelompok Tani Hutan Pada Kegiatan KTH Di Kota Padang. *Jurnal Niara*. Vol 16(1),pp: 132–148.
- Mukrimaa, S.S., *et al.* 2016. Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan Waarmerking Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*. Vol 6(8),pp: 128-140.
- Oktoyoki, H. *et al.* 2023. Post-permit social forestry: An analysis of the economic impact of the forestry revolving fund facility to the community of forest farmers. *E3S Web of Conferences*, 20-25 September 2022. Bengkulu, Indonesia. pp: 245-305.
- Oktoyoki, H., & Suharjito, D. 2016. Pengelolaan sumberdaya hutan di kerinci oleh kelembagaan adat. *Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan*. Vol 3(1),pp: 39–51.
- Poudyal, B.H., Maraseni, T. & Cockfield, G. 2019. Impacts of forest management on tree species richness and composition: Assessment of forest management regimes in Tarai landscape Nepal. *Applied Geography*. Vol 11(1),pp: 102-178.
- Pratama, A.C., & Rijanta, R. 2021. Pengelolaan Berbasis Gender Pada Hutan Kemasyarakatan Batuk liang Utara Kabupaten Lombok Tengah. *JLR - Jurnal Legal Reasoning*. Vol 3(2),pp: 80–99.
- Saheriyanto, S., & Suhaimi, A. 2021. Pendampingan dan Akses Modal sebagai Strategi Access Reform dari Tanah Pelepasan Kawasan Hutan di Kabupaten Barito Kuala. *Jurnal Pertanahan*. Vol 11 (1),pp: 76–88.
- Sarintan, E. *et al.* 2022. The Role Of Forestry Extension Agents In Community Empowerment Farmers Group Pasar Village. Forest Management Unit Iv Balige District Toba Regency. *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)*. Vol 2(1),pp: 145–152.
- Sasauw, C. 2015. Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris. *Lex Privatum*. Vol 3(1),pp: 98–109.
- Sensini, L. 2020. Working capital management and performance: Evidence from Italian SME's. *International Journal of Business Management and Economic Research*. Vol 11(2),pp: 1749–1755.
- Trisni, U., *et al.* 2019. Program Konservasi Hutan Dan Lahan Berperspektif Gender Dalam Upaya Antisipasi Bencana Banjir Dan Longsor Di Segorogunung, Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia. *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*. Vol 2(1),pp:1–8.